

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA RANDUBOTO, KECAMATAN SIDAYU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Achmad Fahim

[fahim.achmad50@gmail.com](mailto:fahim.achmad50@gmail.com)

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

### ABSTRAK

Bentuk nyata dari kepedulian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah dengan pelaksanaan Program Bantuan Tunai Bersyarat atau yang disebut dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini ditujukan sebagai bentuk dari sistem perlindungan sosial kepada keluarga yang rentan miskin atau miskin untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. PKH dilaksanakan sejak tahun 2007. Pelaksanaan PKH tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya ada beberapa hal yang masih harus dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu, apakah sudah sesuai dengan tujuan PKH, bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan bantuan PKH ini dan kendala apa saja yang dihadapi SDM PKH dalam pelaksanaan program ini.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengukuran tingkat efektivitas dalam penelitian ini menggunakan tinjauan dari teori efektivitas *Ni Wayan Budiani* dan teori *Maqashid Syariah* untuk tinjauan dari segi Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu memperoleh nilai efektif baik dari tinjauan teori efektivitas *Ni Wayan Budiani* maupun teori *Maqashid Syariah*, dalam penelitian ini menjelaskan fakta di lapangan tentang pelaksanaan PKH yang sudah berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan kementerian sosial kebijakan dalam PKH. Pelaksanaan program ini memberikan dampak yang positif dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kualitas ekonomi, kualitas pendidikan, dan kesehatan dari KPM PKH.

**Kata Kunci:** Program Keluarga Harapan (PKH), Pengentasan Kemiskinan, Efektivitas Pelaksanaan, Ekonomi Islam.

### A. PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah program bantuan tunai bersyarat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi rumah tangga miskin dan rentan di

Indonesia. Program ini diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).<sup>1</sup> Untuk menjadi KPM PKH ada kriteria yang harus dimiliki oleh calon peserta PKH. Kriteria tersebut dibagi atas tiga komponen yaitu: 1) komponen kesehatan (ibu hamil dan anak usia dini), 2) komponen pendidikan (anak usia sekolah SD, SMP, SMA sederajat), 3) komponen kesejahteraan sosial (lansia dan penyandang disabilitas).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan bahwa sebuah keluarga dikatakan miskin jika mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar baik berupa makanan dan bukan makanan, selain itu juga diukur dengan banyaknya pengeluaran selama sebulan, batas pengeluaran ini yang disebut dengan Garis Kemiskinan (GK).<sup>2</sup> Garis kemiskinan mendefinisikan tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu persepsi masyarakat terhadap kebutuhan dasar (tingkat pendidikan dan kebutuhan dasar), adat istiadat, dan tempat tinggal masyarakat di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa dari bulan Maret 2021 sampai dengan September 2021 presentasi penduduk miskin telah menurun 9,71 persen, dan mendapatkan 0,43 persen poin jika dibandingkan dengan September 2020. Penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemberdayaan pekonomian masyarakat. Program dan kebijakan pemerintah diatur berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa “Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.<sup>3</sup>

Pelaksanaan PKH sebagai salah satu bentuk dari upaya pemerintah dalam mencapai kesejahteraan untuk rakyat Indonesia yang secara tidak

---

<sup>1</sup> Kementerian Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, Kementerian Sosial Republik Indonesia, ISSN: 1938-3207, 2021, Hal 07.

<sup>2</sup> Ibid, Kementerian Sosial. 2021, Hal 09.

<sup>3</sup> Kementerian Sosial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009. *Tentang Kesejahteraan Sosial*.

langsung telah menerapkan prinsip dan tujuan dari ekonomi islam yang sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Salah satu desa yang telah mendapatkan manfaat dari pelaksanaan PKH ini adalah Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Jika dilihat dari pengamatan singkat penulis, penerima manfaat dari PKH ini telah mencapai taraf ekonomi yang lebih baik jika dibanding dengan sebelum menerima manfaat PKH ini. Kendati demikian dalam melaksanakan PKH tidak akan pernah lepas yang namanya kendala. Baik kendala yang dialami oleh para pendamping PKH maupun pemerintah desa.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Letak Geografis Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

Desa Randuboto merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Desa ini memiliki luas wilayah yang cukup luas yaitu 970 Ha dengan topografi sebagai dataran rendah yaitu 976,00 Ha. Desa Randuboto memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Pangkah Wetan, Kec. Pangkah
- b. Sebelah Selatan : Desa Gumeng Kecamatan Bungah
- c. Sebelah Timur : Laut Jawa
- d. Sebelah Barat : Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu

### **2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

Pada struktur organisasi Desa Randuboto tidak jauh berbeda dengan desa yang lain pada umumnya. Dasar hukum dalam pembentukan pemerintahan desa/kelurahan dan pembentukkan BPD berdasar pada Peraturan Daerah (Perda). Desa Randuboto memiliki jumlah perangkat desa/kelurahan sebanyak 20 orang. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Randuboto adalah sebagai berikut: a). Kepala Desa: Bapak Andhi Sulandra S.Pd , b) Sekretaris Desa: Bapak Ahmad Ilhami, S.Sos , c)

Kaur Perencanaan: Min Ilahi Ilaiyah, d) Kaur Tata Usaha dan Umum: Ghina Alfi Rohmati, e) Kaur Keunangan: Ah.Sulton Nadlir, S.Pd.I f) Kasi Pemerintahan: Fatehur Rozi g) Kasi Kesejahteraan: Abdul Wachid, h) Kasi Pelayanan: Nur Wasis, i) Kasun Tanjungsari: Ali Achsan, j) Kasun Ujungsari: Ali Mahfud, k) Kasun Ujung Timur: M. Masyhadi Purwanto

### 3. Profil Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Program keluarga harapan (PKH) yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan pemberian bantuan tunai bersyarat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan juga kebutuhan bagi lansia dan kebutuhan disabilitas. Bantuan ini diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah memenuhi komponen penerima bantuan PKH. Di Desa Randuboto pelaksanaan bantuan PKH ini sudah terlaksana sejak tahun 2007, dan telah berhasil meningkatkan perekonomian KPM PKH untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

**Tabel 1**

#### Jumlah Dana Bantuan KPM PKH Di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2021

No.	Tahap Pencairan	Jumlah Penerima
1.	Tahap 1	299 KPM PKH
2,	Tahap 2	281 KPM PKH
3,	Tahap 3	282 KPM PKH

Sumber: Data Asip Pendamping PKH Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2021

### 4. Karakteristik Sumber Data

#### a. Jenis kelamin

Penerima PKH diberikan kepada perempuan dewasa yang ada dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang disebut sebagai pengurus keluarga. Dalam beberapa kasus pengecualian untuk penerima PKH bisa

digantikan oleh kepala keluarga jika tidak ada perempuan dewasa dalam satu KK tersebut.

**b. Usia**

**Tabel 2**

**Kategori Informan KPM PKH Berdasarkan Pada Usia Di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

No.	Usia	Jumlah Informan
1.	Usia 30-40 tahun	4 orang
2,	Usia 40-50 tahun	3 orang
3,	Usia 50-60 tahun	2 orang
4,	Usia > 70 tahun	1 orang
<b>Total</b>		10 orang

*Sumber: Data Wawancara Dengan KPM PKH Di Desa Randuboto*

**c. Pekerjaan**

**Tabel 3**

**Kategori Informan KPM PKH Berdasarkan Pada Pekerjaan/Mata Pencaharian Di Desa Randuboto Kec. Sidayu Kab. Gresik**

No.	Pekerjaan	Jumlah Informan
1.	Ibu Rumah Tangga	6 orang
2,	Pedagang	1 orang
3,	Dokter	1 orang
4.	Buruh Pabrik	1 orang
5.	Tukang Pijat tradisional	1 orang
<b>Total</b>		10 orang

*Sumber: Data Wawancara Dengan KPM PKH Di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*

**d. Komponen KPM PKH**

**Tabel 4**

**Kategori Informan KPM PKH Berdasarkan Pada Komponen KPM PKH Di Desa Randuboto Kec. Sidayu Kab. Gresik**

No.	Komponen KPM PKH	Jumlah Informan
-----	------------------	-----------------

1.	Pendidikan	6 orang
2,	Kesehatan	2 orang
3,	Kesejahteraan Sosial	2 orang
<b>Total</b>		10 orang

*Sumber: Data Wawancara Dengan KPM PKH Di Desa Randuboto  
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*

## **5. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Randuboto**

Berdasarkan wawancara dari Pemerintah Desa dan Pendamping PKH Desa Randuboto dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan PKH di Desa Randuboto sudah sesuai dengan prosedur dan sudah memahami terkait tahap dalam pelaksanaan PKH di Desa Randuboto ini, akan tetapi untuk meninjau ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) masih harus diperlukan seleksi data KPM PKH lagi, karena mengingat status kesejahteraan sebuah keluarga tidak akan selalu sama setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa KPM PKH yang telah dijelaskan di atas bahwa, pelaksanaan dari PKH masih harus dikaji dan disurvei kembali untuk ketepatan sarannya agar program bantuan PKH ini bisa merata dan dirasakan keefektifitasnya untuk masyarakat yang membutuhkan. Pelaksanaan sosialisasi program kepada KPM PKH sudah dilaksanakan dengan sangat baik. hal ini ditunjukkan dengan adanya pemahaman program dari KPM PKH yang memahami tentang tujuan dari dilaksanakannya PKH dan tujuan saat mendapatkan dana. Beberapa KPM PKH yang dana bantuannya tidak cair bisa dicek kembali pada saat pemutakhiran data agar bisa cair tepat waktu sesuai kebutuhan dari KPM PKH tersebut. KPM PKH juga menjelaskan bahwa pelaksanaan PKH ini sangat membantu keluarga mereka dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan keluarga yang lainnya. Mereka juga menambahkan bahwa dengan adanya PKH ini kualitas pendidikan dan

kesehatan keluarga terutama anak, lansia, dan disabilitas bisa lebih baik dari sebelumnya.

## **6. Analisis Hasil Penelitian Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik**

### **a. Analisis Efektivitas Ditinjau Dengan Teori Dari Ni Wayan Budiani**

Uraian analisis dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan ditinjau dari ekonomi islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu) menggunakan teori dari Ni Wayan Budiani dengan indikator sebagai berikut:

#### **1) Ketepatan Sasaran Program**

Salah satu hal dalam menentukan efektivitas pelaksanaan suatu program adalah dengan adanya ketepatan sasaran program. Ketepatan sasaran program dapat diukur dengan melihat sejauh mana subjek dan objek dari program itu dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaan PKH memiliki kriteria komponen yang harus dimiliki oleh calon KPM PKH yaitu :

- a) Komponen Kesehatan (ibu hamil, anak usia dini 0-6 tahun)
- b) Komponen Pendidikan (anak sekolah SD-SMA/Sederajat)
- c) Komponen Kesejahteraan Sosial (lansia, disabilitas)

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, pelaksanaan PKH di Desa Randuboto sudah bisa dikatakan tepat sasaran, akan tetapi dalam validasi data dan pemilihan calon KPM PKH perlu diseleksi dan dikaji kembali. Masih banyak dari masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan dan memiliki komponen untuk menjadi peserta PKH tetapi tidak berstatus sebagai KPM PKH. Selain itu, tidak sedikit pula KPM PKH yang sudah berstatus sebagai keluarga sejahtera akan tetapi menjadi KPM PKH. Hal ini menjadi permasalahan yang harus dikaji lebih lanjut terutama pada saat pengusulan KPM PKH

dan verifikasi kelayakan keluarga yang dilakukan oleh kementerian sosial. Dalam mengajukan diri sebagai KM PKH ataupun mengundurkan diri dari status KPM PKH membutuhkan rentang waktu yang relatif lama, sehingga hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa perekonomian dari masyarakat juga akan ikut berubah seiring dengan perkembangan waktu.

Beberapa dari KPM PKH juga telah menjelaskan bahwa banyak dari orang disekitarnya yang layak mendapatkan bantuan PKH sekaligus memiliki komponen akan tetapi tidak masuk dalam status sebagai peserta PKH. Banyak dari pengurus rumah tangga dari KPM PKH ini yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, jadi mereka hanya mengantungkan keuangan dari pekerjaan suami dan bantuan PKH ini. sebagian besar dari penerima bantuan PKH masuk pada komponen pendidikan dan mereka menggunakan dana bantuan dari PKH ini untuk membantu suaminya dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak mereka baik untuk membeli seragam, membeli alat-alat sekolah, maupun untuk membayar SPP dan biaya sekolah lainnya. Mereka juga sangat bersyukur dengan adanya PKH ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan mengurangi beban keluarga. Sehingga ketepatan waktu dalam pencairan dana juga sangat digantungkan oleh mereka terutama yang memiliki tanggungan untuk membiayai anak sekolah. Sampai hari ini ketepatan waktu dalam pencairan dana PKH sudah tepat waktu dari tanggal yang telah ditentukan, akan tetapi disisi lain beberapa dari KPM PKH mengaku bahwa mereka tidak bisa menerima dana bantuan di beberapa tahap karena data yang mereka kumpulkan agar bisa lolos pemutakhiran data dari pusat. Hal ini tentunya menjadi PR bagi pendamping PKH ataupun kementerian sosial yang bertugas dalam mengurus bantuan PKH ini untuk lebih memperhatikan lagi kelengkapan data atau kesesuaian data dari KPM PKH agar mereka bisa tetap mendapatkan dana dari bantuan



ini mengingat besarnya harapan dari KPM kepada pencairan dana di setiap tahapnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara dengan beberapa KPM PKH yang ada di Desa Randuboto, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas yang diperoleh dari indikator ketepatan sasaran pelaksanaan PKH di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik didapatkan nilai yang **Cukup Efektif**.

## 2) Sosialisasi program

Menurut Greenberg dalam Edy Sutrisno menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses dari suatu pihak atau individu yang diubah melalui pemberian informasi dan pengarahan dari pihak luar untuk ikut berpartisipasi sebagai anggota dalam suatu organisasi yang efektif.<sup>4</sup> Sosialisasi dalam kaitannya terhadap penelitian ini adalah “pemberian informasi dan pengarahan dari pihak luar” dalam hal ini yaitu pendamping PKH dan pemerintah desa kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang menjadi sasaran dari pelaksanaan program. Menurut Edy Sutrisno keberhasilan dari proses sosialisasi tergantung dari dua hal utama yaitu:

- a) Derajat keberhasilan dalam mendapatkan kesesuaian dari nilai-nilai yang dimiliki oleh objek sosialisasi terhadap budaya dari organisasi tersebut.
- b) Metode yang digunakan dalam sosialisasi.<sup>5</sup>

Sosialisasi program dalam penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan informasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) kepada sasaran dari program yaitu Keluarga penerima manfaat (KPM) PKH agar bisa dipahami tentang apa saja yang berkaitan dengan program keluarga harapan (PKH). Ni Wayan Budiani merumuskan sosialisasi program sebaga

---

<sup>4</sup> Edy Sutrisno, (2010), *Budaya Organisasi*, Kencana: Jakarta, hal 19.

<sup>5</sup> Ibid.... Edy Sutrisno, 2010, hal 19

indicator kedua dalam menentukan tingkat efektivitas suatu program. Pelaksanaan bantuan PKH di Desa Randuboto sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan termasuk pelaksanaan sosialisasi kepada KPM PKH baik sebelum menjadi peserta PKH maupun setelah menjadi peserta PKH.

Hasil wawancara dengan beberapa KPM PKH menjelaskan bahwa selalu dilakukan sosialisasi program secara rutin, akan tetapi pada saat pandemi *Covid-19* tidak ada sosialisasi yang dilakukan karena larangan berkumpul dengan banyak pihak oleh pemerintah. KPM PKH di Desa Randuboto mendapatkan sosialisasi program dari pendamping PKH dan juga pemerintah desa mengenai pelaksanaan dari PKH, tujuan pelaksanaan PKH, tujuan menjadi peserta PKH, hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap KPM PKH, maupun sosialisasi berupa pendampingan secara moral dan spiritual kepada para KPM PKH. Para KPM PKH di Desa Randuboto mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan baik dari pendamping PKH maupun dari pemerintah desa randuboto. Saat diwawancarai mengenai beberapa hal tentang PKH yang ada di Desa Randuboto, KPM PKH memahami tentang tujuan dari pelaksanaan program, hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dan alur dalam menjadi KPM PKH. Pada masa pandemi *Covid-19* ini kegiatan yang menyebabkan kerumunan dilarang oleh pemerintah namun Pembimbing PKH tetap bisa memberikan informasi seputar PKH lewat media sosial sehingga KPM PKH mengetahui tentang perkembangan PKH tersebut.

Sejalan dengan pemahaman pada informasi program keluarga harapan (PKH) dari KPM PKH, ada kendala yang dihadapi oleh pendamping PKH dan pemerintah Desa Randuboto ketika melaksanakan sosialisasi program keluarga harapan ini diantaranya adalah Ketika dilaksanakan sosialisasi program banyak dari KPM PKH yang tidak tepat waktu atau datang terlambat sehingga dalam

pemberian informasi menjadi terhambat dan harus diulangi kembali karena adanya *missed communication*. Berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas dari indikator sosialisasi program mendapatkan nilai **efektif**.

### 3) Tujuan Program

Tujuan program yang menjadi pedoman dalam mencapai keberhasilan dari pelaksanaan PKH adalah:

- a) Meningkatkan status sosial ekonomi KPM.
- b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan dari KPM
- c) Terciptanya perilaku kemandirian KPM untuk mengakses layanan kesejahteraan sosial termasuk pendidikan dan kesehatan.
- d) Mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan ekonomi KPM.
- e) Perkenalan tentang produk dan jasa formal kepada KPM.<sup>6</sup>

Ukuran efektivitas pelaksanaan suatu program dapat dilihat dengan membandingkan antara tujuan program dengan output yang telah dikeluarkan. Upaya dan strategi yang digunakan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Randuboto untuk mencapai tujuan pelaksanaan program telah diperoleh data di lapangan dari hasil wawancara dengan SDM PKH dan KPM PKH didapatkan hasil perhitungan dengan beberapa fakta yang telah dijabarkan oleh KPM PKH dan SDM PKH dengan penilaian **efektif**.

Hasil dari penelitian ini ditunjukkan dengan penjabaran dari objek penelitian yang menjelaskan bahwa, pelaksanaan PKH di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ini sudah mampu mensejahterakan keluarga dari KPM PKH. Pelaksanaan PKH ini juga sudah membantu keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan

---

<sup>6</sup> Ibid.... Kementerian Sosial, 2021, Hal 22.

kebutuhan keluarga yang lainnya. Beberapa dari KPM PKH yang telah mengundurkan diri juga mengaku telah merasa mandiri secara ekonomi sehingga merasa tidak berhak lagi untuk mendapatkan bantuan PKH ini. dari hasil pelaksanaan ini sudah efektif dengan dicapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan sebelumnya maka program tersebut bisa dikatakan sudah efektif.

#### 4) Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana program dalam memberikan perhatian kepada peserta program setelah mengikuti program.<sup>7</sup> Pemantauan program dilakukan untuk memantau program apakah telah memberikan dampak positif yang berkelanjutan kepada peserta setelah mengikuti program tersebut. Kegiatan pemantauan program juga dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang menjadi kekurangan agar bisa ditemukan solusi dari permasalahan tersebut. Efektivitas dari pelaksanaan PKH di desa randuboto dapat diukur dengan indikator pemantauan program. Dalam melakukan pemantauan program hal yang dilakukan oleh pendamping PKH dan pemerintah desa selaku SDM PKH adalah dengan melaksanakan kegiatan pemantauan kepada KPM PKH. Pemantauan ini dilakukan melalui komunikasi langsung dengan peserta program, pemantauan kepada peserta program juga dilakukan dengan berbagai media telekomunikasi seperti sosial media dan yang lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan yang berasal dari penelitian yang dilakukan dengan responden, didapatkan kesimpulan bahwa penerapan kegiatan pemantauan program dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dengan adanya wawancara dan observasi yang telah dilakukan ketika mendampingi pendamping PKH pada saat mengadakan observasi dan sosialisasi rutin dengan KPM PKH dengan penilaian efektivitas, yang dilakukan tersebut maka, indikator efektivitas dari pemantauan program di desa randuboto kecamatan sidayu kabupaten gresik mendapatkan nilai **efektif**.

#### b. Analisis Efektivitas Ditinjau Dengan Maqashid Syariah

---

<sup>7</sup> Ahmad Jibril, (2017). Efektivitas Program Perpuseru Di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan. Jurnal Universitas Airlangga, 1–8.

Pada bagian ini peneliti membahas tentang Uraian analisis dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan ditinjau dari ekonomi islam dengan menggunakan Teori Maqashid Syariah yaitu:

### 1) *Dharuriyat*

Pada tingkat maqashid syariah Dharuriyat mencakup yaitu:

- a) **Pemeliharaan Agama:** Kaitannya dengan pelaksanaan PKH adalah pelaksanaan PKH adalah mampu memahami dasar-dasar agama. Pendamping PKH telah memberikan bimbingan spiritual kepada KPM PKH seperti membaca surat *al waqiah* sebelum memulai pertemuan rutin dengan KPM PKH dan nasihat-nasihat agama yang diberikan oleh pendamping PKH lainya.
- b) **Pemeliharaan Jiwa:** Kaitannya dengan pelaksanaan PKH adalah mudahnya akses **kesehatan** yang merupakan bagian pokok dari pemeliharaan jiwa. Dengan kualitas kesehatan yang baik eksistensi dari jiwa manusia akan terlindungi. Hasil dari wawancara dengan KPM PKH Desa Randuboto, mereka menjelaskan bahwa dana bantuan yang diberikan dari PKH juga mereka gunakan untuk kebutuhan kesehatan.
- c) **Pemeliharaan Akal:** Kaitannya dengan pelaksanaan PKH adalah menggunakan dana bantuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menjaga akal merupakan aspek yang diwajibkan oleh syariat islam. Hasil wawancara **dengan** KPM PKH Desa Randuboto komponen pendidikan menyebutkan bahwa dana yang mereka dapatkan dari pencairan bantuan PKH sudah mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Mereka juga menyebutkan bahwa dengan adanya bantuan PKH ini kualitas pendidikan anak juga meningkat. Kebutuhan akan pendidikan juga bisa terpenuhi dengan baik.
- d) **Pemeliharaan Keturunan:** Kaitannya dengan pelaksanaan PKH adalah terpenuhinya kebutuhan ibu hamil, menyusui, dan

nifas. Memelihara keturunan berarti memelihara kelestarian manusia dan generasi. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh ibu hamil ketika menjadi KPM PKH adalah dengan mendorong ibu untuk mendapatkan akses kesehatan dan keterlibatan tenaga medis pasca persalinan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.

- e) **Pemeliharaan Harta:** kaitannya dengan pelaksanaan PKH adalah dengan adanya pelaksanaan PKH mampu membantu masyarakat miskin dan rentan miskin untuk memiliki dana tambahan dari pencairan dana bantuan PKH ini. Dengan uang tersebut, mereka bisa membeli bahan-bahan pokok seperti beras, minyak dan gula. Mereka juga bisa memanfaatkannya untuk membelikan susu bagi anak-anak mereka. Bantuan tersebut tetap membantu meringankan beban hidup mereka. Konsep *maqâsshîd syarî'ah*, harta menjadi suatu segmen yang mendapat perlindungan. Eksistensinya dilindungi oleh agama, segala kebijakan atau peraturan yang dibuat harus mampu memberi rasa aman dan tenang sehingga manusia dapat menjalani kehidupannya dengan baik.

Berdasarkan analisis dari kelima unsur yang ada pada tingkat *Dhahuriyat* bahwa, pelaksanaan PKH di Desa Randuboto mendapatkan penilaian **efektif**.

## 2) *Hajiyat*

Pada tingkat *Hajiyat* (kebutuhan sekunder) kebutuhan ini bersifat melengkapi, menguatkan, dan melindungi tingkatan *Dharuriyat*.<sup>8</sup> Implementasinya dengan pelaksanaan PKH di desa randuboto adalah dengan memanfaatkan dana bantuan PKH untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial KPM PKH. Selain itu, jika dana yang didapatkan secara tepat

---

<sup>8</sup> Rozalinda. (2014). *Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi. Ekonomi Islam*. Hal 106

waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dari masing-masing komponen maka KPM PKH akan benar-benar terbantu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mengingat mereka juga sangat membutuhkan dana tersebut untuk menambah dan membantu pendapatan keluarga. Berdasarkan analisis dari tingkat *Hajiyat* bahwa, pelaksanaan PKH di Desa Randuboto mendapatkan penilaian **efektif**.

### 3) *Tahsiniyat*

Pada tingkat *tahsiniyat* (kebutuhan tersier) bersifat memperindah pelaksanaan *dharuriyat dan hajiyat*, maka jika kebutuhan *tahsiniyat* tidak terpenuhi tidak akan merusak tingkatan yang ada di atasnya.<sup>9</sup> Tingkat *tahsiniyat* ini tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan PKH desa randuboto karena tujuan dari pelaksanaan PKH adalah untuk memenuhi kebutuhan pada akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, jadi bukan dengan menggunakan dana bantuan untuk membeli barang-barang yang diinginkan seperti membeli barang-barang mewah untuk menunjang gengsi semata. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, KPM PKH lebih memilih menggunakan dana untuk keperluan pendidikan, kesehatan, kebutuhan keluarga daripada digunakan untuk berfoya-foya karena untuk mencukupi kebutuhan harian saja mereka sudah kekurangan. Akan tetapi dalam ketepatan sasaran masih harus diperbaiki dan dikaji kembali mengingat masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana PKH tetapi tidak berstatus sebagai KPM PKH. Berdasarkan analisis dari tingkat *Tahsiniyat* bahwa, pelaksanaan PKH di Desa Randuboto mendapatkan penilaian **cukup efektif**.

Dari ketiga tingkatan dalam maqashid syariah diatas yang paling sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan PKH adalah tingkat *Dharuriyat*. Karena dalam kebijakan tersebut telah berdampak pada lima unsur

---

<sup>9</sup> Ibid.... Rozalinda, 2017, hal 106



pokok dari kehidupan *manusia* yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga jika dilihat tingkat efektivitas pelaksanaan PKH di Desa Randuboto yang ditinjau dengan Ekonomi Islam (teori *maqashid syariah*) memperoleh nilai **efektif**.

**c. Kendala Dalam Pelaksanaan PKH Di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk nyata dari partisipasi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. PPKH ditujukan kepada masyarakat mengengah kebawah yang telah ditetapkan sebagai KPM PKH. Sampai tahun 2022 ini PKH telah menjadi *center of excellence* dalam menanggulangi bencana kemiskinan yang ada di Indonesia. Terbukti dengan pelaksanaan PKH dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 9,71% di September 2021 menjadi 9,54% di Maret 2022. Hal ini tentunya menjadi bentuk dari pemulihan ekonomi nasional yang berjalan dengan sangat baik. kendati demikian, pelaksanaan PKH tentunya tidak akan lepas dari kendala. Beberapa kendala yang dialami pendamping PKH dan pemerintah desa randuboto selaku SDM PKH menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PKH Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ini yaitu:

- 1) Kurang tepatnya sasaran dalam pelaksanaan PKH. Terbukti dengan adanya beberapa masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan PKH akan tetapi tidak berstatus sebagai KPM PKH sehingga hal ini berdampak pada kesenjangan ekonomi antara masyarakat miskin dengan status KPM PKH dengan masyarakat miskin dengan status non-KPM PKH.
- 2) Budaya “Jam Karet” oleh KPM PKH ketika diadakan sosialisasi PKH. Ketepatan waktu dari yang telah ditetapkan sebelumnya sangat diperlukan dan harus diterapkan karena ini menyangkut pemahaman KPM PKH terhadap informasi yang berkaitan dengan PKH dan tentunya membuang waktu jika harus menunggu.

Informasi ini biasanya akan diberikan oleh pendamping PKH ketika melakukan sosialisasi. Hal ini berdampak pada keterbatasan informasi yang didapatkan oleh KPM PKH karena informasi yang diterima tidak menyeluruh.

- 3) Kuota yang disediakan oleh pemerintah masih terbatas, sehingga berdampak pada tidak semua warga miskin yang layak dan memiliki komponen PKH bisa terdaftar sebagai KPM PKH.

Kendala yang telah dijelaskan di atas ketika Pelaksanaan PKH di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik tersebut diketahui dari penuturan SDM PKH yaitu Pendamping PKH dan Pemerintah Desa Randuboto.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan dari teori, survey, penelitian, dan analisis data terhadap efektivitas pelaksanaan PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan ditinjau dari ekonomi islam studi kasus di desa randuboto kecamatan sidayu kabupaten gresik yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa,

1. Hasil dari analisis efektifitas pelaksanaan dengan Teori Efektivitas dari Ni Wayan Budiani (2007) menjelaskan bahwa Efektivitas Pelaksanaan PKH di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan PKH sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan kesadaran KPM PKH untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai KPM PKH tersebut.

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PKH Di Desa Randuboto Dengan Teori Efektivitas Ni Wayan Budiani (2007)

- a) Ketepatan Sasaran Program : Cukup Efektif
  - b) Sosialisasi Program : Efektif
  - c) Tujuan Program : Efektif
  - d) Pemantauan Program : Efektif
2. Hasil dari analisis efektivitas pelaksanaan PKH di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan menggunakan teori

*Maqashid Syariah* menjelaskan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, sudah berjalan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan akibat dari pelaksanaan PKH ini banyak dari KPM PKH yang merasa sangat terbantu dengan dana PKH dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga lainnya.

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PKH Di Desa Randuboto Dengan Teori *Maqashid Syariah* (Al Syatibi)

- a) *Dhahuriyat* : Efektif
  - b) *Hajiyat* : Efektif
  - c) *Tahsiniyat* : Cukup Efektif
3. Peranan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia terutama di lokasi penelitian yaitu Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan cukup baik dengan tinjauan perspektif ekonomi islam
  4. Kendala yang dihadapi oleh SDM PKH dalam melaksanakan PKH di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dan juga kepuasan yang dirasakan oleh KPM PKH pada pelayanan SDM PKH.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Jibril, A. (2017). *Efektivitas Program Perpuseru Di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Universitas Airlangga, 1–8.
- Aldzuhri D, Rizki Rigeras. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Pangung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2019*, 3(2), 6.
- Arifin, I. P. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan struktural (Telaah teori strukturasi Anthony Giddens)*. SeNSosia Seminar Nasional Sosiologi (Vol. 2, pp. 121–133). Universitas Mataram.
- Faisal, M., Febriadi, S. R., & Mujahid, I. (2020). *Analisis Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (pp. 136–139).
- Ganiau. Maryam B, (2021), *Pengantar Metode Penelitian*, PT. Kanisius: Yogyakarta.

- Habibah, A. N., Ghafur, R. A., Anggraeni, E., & Malik, A. (2020). *Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 251. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1014>
- Izzati, R. A., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2020). *The Behavioral Effects of Unconditional Cash Transfers : Evidence from Indonesia* (pp. 1–45).
- Karim, Adiwarman Azwar, (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Rajagrafindo Persada: Jakarta, Edisi Keenam.
- Kementerian Sosial, (2021), *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, Kementerian Sosial Republik Indonesia, ISSN: 1938-3207.
- Mudlofar. M, (2016), *Metode Penelitian: Pemahaman Metodologis Ke Arah Aplikasi*. Lentera Cendikia: Surabaya.
- As-Shalih, M. bin A. (2001). *Manajemen Islami Harta Kekayaan*. Era Intermedia.
- Hastyorini, I. R. (2018). *Seri Pengayaan Pembelajaran Ekonomi, MANAJEMEN*. (K. Sari, Ed.). Aksarra Sinergi Media.
- Ramadhan, A. H. (2021). *Lansia Penerima Program Kelurga Harapan Di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir*, 4(1), 1–23.
- Rozalinda. (2014). *Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. *Ekonomi Islam*.
- Suardi, D. (2021). *Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta.
- Susanti, Ria. (2021). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Karakter Keluarga Mandiri di Desa Durian Lecah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Meragin*, 4(1), 6.
- Sutrisno, Edy. (2010), *Budaya Organisasi*, Kencana: Jakarta.
- Sya'bani, A. A. (2019). Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. *Jurnal Al'iidara Balad*, 2(1), 37–44.
- Kementerian Sosial, (2021), *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, Kementerian Sosial Republik Indonesia, ISSN: 1938-3207.